

TESIS

**PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI
PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02
Oktober 2023)**

**SUBMISSION OF CRIMINAL CASES TO THE DISTRICT COURT
AFTER PRETRIAL DECISION
(Case Study of Case Number 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Dated October
02, 2023)**



Oleh:

TOMMY DETASATRIA

NIM. 2210622046

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN
NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG
Tanggal 02 Oktober 2023)**

**SUBMISSION OF CRIMINAL CASES TO THE DISTRICT
COURT AFTER PRETRIAL DECISION
(Case Study of Case Number 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Dated
October 02, 2023)**



Oleh:

TOMMY DETASATRIA

NIM. 2210622046

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN
NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG
Tanggal 02 Oktober 2023)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

TOMMY DETASATRIA

NIM. 2210622046

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02 Oktober 2023)

Disusun dan diajukan oleh:

TOMMY DETASATRIA

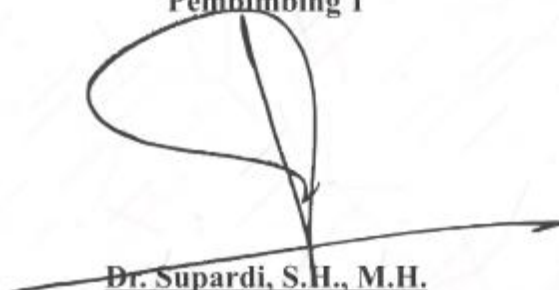
NIM. 2210622046

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Supardi, S.H., M.H.
NIP. 197104281995031001

Pembimbing 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 198601272024061001



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI PASCA
PUTUSAN PRAPERADILAN**
(Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02
Oktober 2023)

Disusun dan diajukan oleh:

TOMMY DETASATRIA

NIM. 2210622046

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal 26 Juni 2025

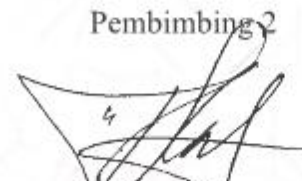
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1


Dr. Supardi, S.H., M.H.
NIP. 197104281995031001

Pembimbing 2


Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 198601272024061001

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister


Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIKD. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Scherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 26 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tommy Detasatria
NIM : 2210622046
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02 Oktober 2023)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Tommy Detasatria
NIM. 2210622046

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tommy Detasatria
NIM : 2210622046
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“ PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02 Oktober 2023)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Tommy Detasatria
NIM. 2210622046

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini
4. Dr. Supardi. S.H., M.H, selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
6. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 di Program Studi Hukum Program Magister yang selalu saling support;

7. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang harus disadari dan diperbaiki. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini dapat menambah khazanah referensi ilmu dibidang hukum serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, _____

Penulis

TTD

Tommy Detasatria

ABSTRAK

PELIMPAHAN PERKARA PIDANA KE PENGADILAN NEGERI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Tanggal 02 Oktober 2023)

Tommy Detasatria (2210622046), Supardi, Slamet Tri Wahyudi

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Putusan praperadilan yang membatalkan suatu tindakan penyidikan atau penetapan tersangka berimplikasi langsung terhadap proses hukum selanjutnya. Setelah suatu perkara diputus dalam praperadilan, Penuntut Umum dihadapkan pada dilema apakah tetap melanjutkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, meskipun putusan praperadilan menyatakan tindakan penyidikan atau penetapan tersangka tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Putusan Praperadilan terhadap kewenangan Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, serta untuk mengidentifikasi ketidakjelasan regulasi yang ada dalam hukum acara pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun praperadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka, keputusan praperadilan yang membatalkan penyidikan atau penetapan tersangka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penuntut Umum. Pasal 140 KUHAP tidak memberikan pedoman yang jelas tentang tindakan yang harus diambil oleh Penuntut Umum setelah adanya Putusan Praperadilan yang membatalkan penyidikan. Hal ini dapat memperlambat proses pelimpahan perkara dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakjelasan hukum terkait pelimpahan perkara pidana pasca Putusan Praperadilan menyebabkan kesenjangan dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam regulasi KUHAP agar memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri setelah putusan praperadilan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia agar lebih adil dan transparan, serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: pelimpahan perkara pidana, praperadilan, kewenangan penuntut umum, kepastian hukum, hukum acara pidana.

ABSTRACT

SUBMISSION OF CRIMINAL CASES TO THE DISTRICT COURT AFTER PRETRIAL DECISION (Case Study of Case Number 1545/PID.SUS/2023/PN TNG Dated October 02, 2023)

Tommy Detasatria (2210622046), Supardi, Slamet Tri Wahyudi

Pretrial is a mechanism for monitoring the actions of law enforcement officials, including the determination of suspects, detention, termination of investigation, and termination of prosecution. A pretrial decision that invalidates an investigation or a suspect determination has direct implications for the subsequent legal process. After a case is decided in pretrial, the Public Prosecutor is faced with the dilemma of whether to continue the submission of the case to the District Court, even though the pretrial decision declares the investigation or determination of a suspect invalid. This study aims to analyze the impact of pretrial decisions on the authority of the Public Prosecutor in referring criminal cases to the District Court, as well as to identify unclear regulations in Indonesian criminal procedure law. The method used in this research is normative legal research with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Based on the analysis, it was found that although pretrial serves to protect the rights of suspects, pretrial decisions that invalidate investigations or suspect determinations can cause legal uncertainty for the Public Prosecutor. Article 140 of KUHAP does not provide clear guidelines on the actions to be taken by the Public Prosecutor following a pretrial decision that invalidates an investigation. This can slow down the case submission process and potentially harm the parties involved, including victims. This research also found that the lack of legal clarity regarding the submission of criminal cases after a Pretrial Decision causes gaps in the application of criminal procedure law in Indonesia. For this reason, this study recommends changes in the KUHAP regulations to provide legal certainty regarding the authority of the Public Prosecutor in transferring cases to the District Court after a pretrial decision. This recommendation is expected to improve Indonesia's criminal justice system to be more fair and transparent, and reduce legal uncertainty in the law enforcement process.

Keywords: *delegation of criminal cases, pretrial, public prosecutor's authority, legal certainty, criminal procedure law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL HASIL PENELITIAN..Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teoritis.....	18
1. Teori Keadilan Hukum	18
2. Teori Kepastian Hukum	20
3. Teori Kemanfaatan Hukum	23
B. Kerangka Pikir	25
C. Definisi Operasional.....	32
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
D. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Dampak Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 101/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL terhadap Kewenangan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana yang Telah Menerima Tersangka dan Barang Bukti.....	43
B. Pengaturan dalam KUHAP ke Depan Terkait Kewenangan Pelimpahan Perkara yang Berada di Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri setelah Adanya Putusan Praperadilan	61
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 2 Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan....	Error!
Bookmark not defined.	